

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI, HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

Sebelum peneliti memaparkan lebih jauh terkait data laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pamekasan, terlebih dahulu peneliti akan menguraikan profil lembaga daerah tempat penelitian ini yang peneliti himpun dari beberapa sumber antara lain jurnal dan website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.

##### **1. Sejarah Berdirinya Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan**

Sejarah Kabupaten Pamekasan melalui proses sejarah yang cukup panjang, nama Pamekasan baru dikenal pada tahun 1633, pada saat Ronggo Sukowati mulai mengalihkan kekuasaan pemerintahan dari kraton Labangan Daja ke Kraton Mandilaras. Memang, tidak ada cukup bukti dokumenter untuk menyebutkan proses pengalihan kekuasaan sehingga ada perubahan nama daerah ini.<sup>1</sup>

Demikian pula, sulit menemukan bukti tertulis munculnya sejarah pemerintahan Pamekasan, terutama prasasti yang menjelaskan kapan dan bagaimana keberadaanya. Munculnya sejarah pemerintahan di Pamekasan, menurut data sejarah tentang lahirnya mitos atau legenda Aryo Menak Suoyo yang mulai berkembang pemerintahan daerah diperkirakan baru dikenal sejak pertengahan tahun.

---

<sup>1</sup> “Kominfo Kabupaten Pamekasan,” 2021, <https://pamekasankab.go.id/sejarah>.

Abad ke 15 di daerah Paroppo atau Parupuk, sejak awal kemunculan legenda ini sebelumnya keberadaan Pamekasan jarang dibicarakan. Diperkirakan Pamekasan adalah bagian dari wilayah pemerintahan Madura dan Sumenep, yang berdiri sejak pengangkatan Arya Wiraraja oleh Kartanegara pada 13 Oktober 1268.

Apabila pemerintah daerah Pamekasan lahir pada abad ke 15, maka tidak dapat dipungkiri bahwa kabupaten ini lahir di zaman kegelapan Majapahit, ketika wilayah pesisir Majapahit adalah yang pertama membentuk pemerintahan otonom. Mengenai sejarah kelam Majapahit, tentunya minimnya data sejarah tidak dapat dipungkiri, karena di Majapahit sendiri pengaturan untuk mempertahankan wilayah lamanya sangat padat dan ruang lingkup kegiatannya sangat luas.<sup>2</sup>

Pada waktu itu, sastrawan-sastrawan terkemuka seperti yang setingkat Mpu Prapanva dan Mpu Tantular tidak begitu banyak menghasilkan karya sastra, dan kehidupan orang Madura tampak lebih berkembang dalam sastra lisan daripada sastra tulis. Tulisan-tulisan pada saat itu yang mulai masuk ke dalam sejarah pemerintahan Pamekasan pada awalnya sebagian besar ditulis oleh penulis Belanda, sehingga banyak menggunakan bahasa Belanda dan kemudian mulai diterjemahkan atau ditulis ulang oleh sejarawan Madura seperti Zainal Fatah atau Adurrahman. Memang benar ada bukti tertulis lain di asyarakat, seperti tulisan di daun lontar atau layang-layang Madura, namun tulisan di layang-layang ini lebih banyak menceritakan tentang riwayat hidup Nabi dan para sahabatnya termasuk ajaran agama yang menjadi sumber pendidikan agama bagi masyarakat luas.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> “Kominfo Kabupaten Pamekasan.”

<sup>3</sup> “Kominfo Kabupaten Pamekasan.”

Masa pencerahan sejarah daerah pamekasan mulai terkuak ketika pengaruh Mataram mulai masuk ke Madura sekitar pada paruh kedua abad ke 16. Terutama ketika Ronggo Sukowati mulai mereformasi pemerintahan dan pembangunan daerah. Bahkan Ronggo Sukowati disebut sebagai raja pertama di Pamekasan yang secara terang-terangan mulai mengembangkan ajaran Agama Islam di Keraton dan rakyatnya. Hal itu diperkuat dengan pembuatan Jalan Jimat, Jalan Alun-Alun Kota Pamekasan dan berdirinya Masjid Jami' Pamekasan. Akan tetapi, sampai saat ini belum ditemukan prasasti atau bukti sejarah untuk mengidentifikasi tanggal dan bulan atau waktu yang tepat ketika ia pertama kali memerintah Pamekasan.

Bahkan pemerintahan Ronggo Sukowati mulai dikenal karena legenda Kyai Joko Piturun yang merupakan pusaka andalan Ronggo Sukowati, konon mampu membunuh Pangeran Lemah Duwur dari Arosbaya melalui peristiwa mimpi. Padahal adanya penemuan tersebut dapat dijadikan catatan sejarah untuk menentukan hari jadi kota Pamekasan.<sup>4</sup>

## **2. Profil Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan**

Badan keuangan daerah Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu organisasi lembaga daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan, unsur penunjang urusan pemerintahan dan kewenangan kabupaten di bidang keuangan daerah. Lembaga keuangan daerah Kabupaten Pamekasan didirikan berdasarkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur tentang pembentukan dan susunan daerah yang merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah di bidang

---

<sup>4</sup> "Kominfo Kabupaten Pamekasan."

keuangan daerah. Perbendaharaan daerah merupakan organisasi instansi daerah yang merupakan penggabungan dari badan pengelola aset daerah dan badan pendapatan daerah Kabupaten Pamekasan.<sup>5</sup>

Susunan organisasi lembaga keuangan daerah telah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, fungsi serta tata kerja lembaga keuangan daerah, dan terdiri dari enam bidang dan satu sekretariat. Keenam bidang tersebut adalah pendaftaran, pendataan, penetapan dan pengendalian, penagihan dan keberatan, anggaran, aset daerah, pendanaan, dan terakhir akuntansi serta pelaporan. Lembaga keuangan daerah dipimpin oleh kepala lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Tugas kepala badan membantu bupati dalam menyusun suatu kebijakan, pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengelolaan serta pengendalian keuangan dan aset daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut kepala badan membawahi sekretariat, yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum kepegawaian, penatalaksanaan hukum, informasi kesehatan penyusunan program, perlengkapan dan aset, perpustakaan dan kearsipan serta monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja dan keuangan badan. Sekretariat bertanggung jawab atas bagian pelayanan umum dan kepegawaian, bagian perencanaan dan evaluasi serta bagian keuangan dan aset. Tugas bidang pendaftaran, pengumpulan, penetapan, dan pengendalian

---

<sup>5</sup> “Websiter Resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,” 2021, <https://keuanganpamekasankab.com/v2/>.

adalah mengoordinasikan dan melaksanakan pendaftaran data tentang identifikasi dan pengendalian subjek dan objek pajak daerah serta sumber pendapatan lain, memverifikasi, menghitung, dan mengumumkan ketetapan pajak daerah, dan memberikan nasehat kepada wajib pajak. Tugas bagian penagihan dan keberatan adalah mengoordinasikan penerimaan pajak daerah dan sumber pendapatan lain, mengumpulkan dan menyerahkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melengkapi permohonan keberatan pajak daerah. Bagian anggaran bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional untuk menyiapkan dan mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>6</sup>

Bagian bidang pembendaharaan bertugas menyelenggarakan fungsi pembendaharaan untuk belanja langsung, belanja tidak langsung untuk gaji pegawai, dan belanja tidak langsung untuk hibah, bantuan, kontinjensi, dan pembiayaan, yang dicakup dalam APBD. Tugas divisi aset daerah adalah mengembangkan dan mengelola komoditas atau aset milik daerah. Departemen Akuntansi dan Pelaporan bertugas melakukan pembukuan atas transaksi keuangan, pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, aset, utang usaha, dan ekuitas dana, termasuk perhitungan dalam rangka pelaporan keuangan daerah dan pertanggung jawaban sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> “Websiter Resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.”

<sup>7</sup> “Websiter Resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.”

### 3. Visi dan Misi Pemerintah Daerah

Visi dan misi ditetapkan dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat dan berdasarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan, dengan memperhatikan aspirasi sosial politik masyarakat dan didukung oleh komitmen pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan sebagai acuan dan misi jangka Kabupaten Pamekasan 2005-2025 agenda pembangunan adalah<sup>8</sup>:

#### Visi

*“Terwujudnya Pamekasan yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dan Minapolitan Secara Berkelanjutan Menuju Ridho Allah SWT”*

Pengertian visi ialah:

- a. Maju berarti keadaan sosial yang berkembang menuju keadaan yang lebih baik dari segi sosial ekonomi, budaya, politik dan hukum.
- b. Daya saing artinya kemampuan untuk tumbuh dan berkembang serta memiliki posisi tawar yang sejajar (setara dan simetris) dengan pihak lain, terutama dalam pemasaran produk dan menarik investasi.
- c. Agropolita, yang berarti pengembangan ekonomi pertanian terpadu dan berkelanjutan berbasis pertanian di wilayah-wilayah terpilih (agribisnis).
- d. Minapolitan, yaitu konsep pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan daerah yang didasarkan pada prinsip keterpaduan, efisiensi, kualitas dan percepatan.
- e. Berkelanjutan, artinya proses dan perkembangan yang dapat terus berkembang secara mandiri sesuai dengan potensinya.

---

<sup>8</sup> “Kominfo Kabupaten Pamekasan.”

- f. Menuju Ridho Allah SWT, berarti ingin mendapat hidayah dan Ridho Allah SWT.

#### Misi

Untuk mencapai visi dan agenda pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan, menurut RPJP Nasional dan RPJPD Jawa Timur, secara garis besar, Misi Pembangunan jangka panjang Kabupaten Pamekasan tahun 2005-2025 ialah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan masyarakat dengan memenuhi dan menjalankan kewajiban pemeluknya hukum agama sesuai dengan petunjuk dan Ridho Allah SWT.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan serta meningkatkan akses masyarakat secara non diskriminatif.
- c. Meningkatkan perekonomian berbasis pertanian dan perkotaan serta mendorong pengembangan potensi ekonomi manusia yang berkelanjutan.
- d. Pembangunan infrastruktur untuk mendorong daya saing investasi, pengelolaan lingkungan Sumber Daya Alam dan penataan ruang sesuai dengan potensi dan sumber daya daerah.
- e. Mewujudkan pengentasan kemiskinan yang efektif, mempersempit kesenjangan sosial dan daerah meningkatkan kualitas kemampuan angkatan kerja, serta memberikan kesempatan kerja yang memadai.
- f. Menciptakan ketentraman dan ketertiban sosial serta memelihara supremasi hukum yang adil, transparan dan profesional.
- g. Percepatan reformasi birokrasi profesional dan singkirkan KKN

- h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang benar-benar prima dan penerapan SPM (standart pelayanan minimal) diseluruh lembaga pelayanan publik.

#### **4. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

*“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel”*

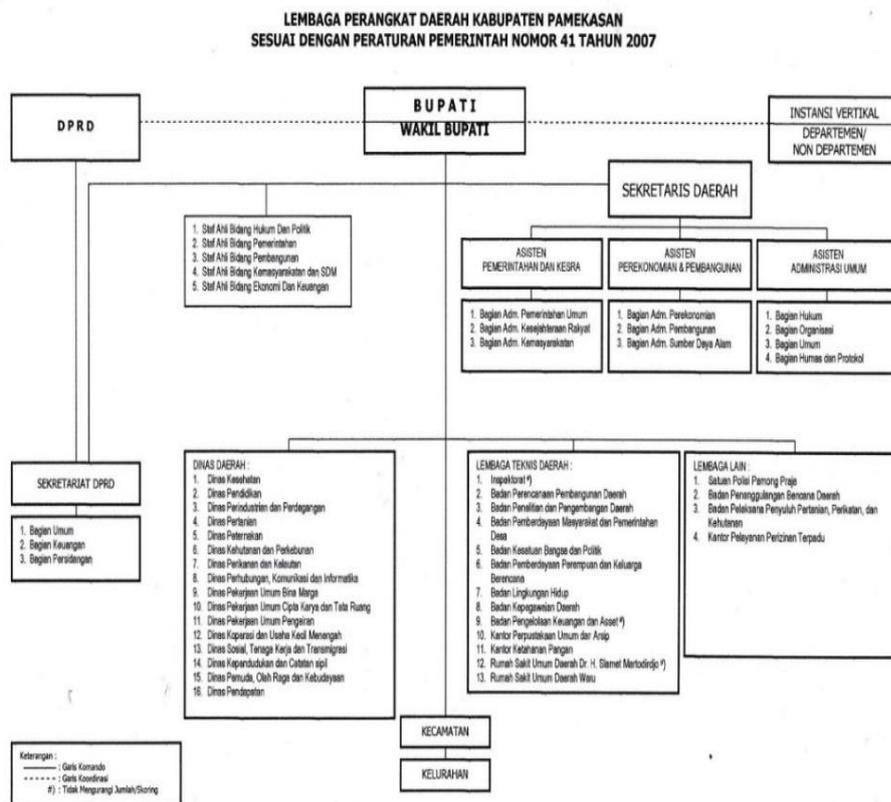
Adapun misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan yaitu<sup>9</sup>:

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab.
- b. Meningkatkan entesifikasi dan perluasan pendapatan asli daerah yang terukur dan berkualitas

---

<sup>9</sup> “Websiter Resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.”

## 5. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan**

### Keterangan<sup>10</sup>:

- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Bupati                      | : H. Baddrut Tamam, S.PSI, M,HP   |
| 2. Wakil Bupati                | : Dr. Ir. H.R.B Fattah Jasin, M.S |
| 3. Sekretaris Daerah           | : Ir Totok Hartono M.A            |
| 4. Asisten Pem dan Kesra       | : Drs. Mochammad Tarsun, M.S.i    |
| 5. Asisten Ekonomi Pembangunan | : Ir. Nurul Widiastuti            |
| 6. Asisten Administrasi Umum   | : Bambang Edy Suprpto, S.H., M.M  |
| 7. Staf Ahli Hukum dan Politik | : Drs. Didik Haryadi, M.Si        |

<sup>10</sup> “Websiter Resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.”

8. Inspektur Daerah : H. Mohammad Alwi, S.Sos
9. Kep. Perencanaan Pembangunan : Drs. Taufiqurrachman, M.Si
10. Sekretaris Bakesbangpol : Drs. Ec. Effendi Sutrisno
11. Kep. Kesejahteraan Rakyat : Akhmad Zaini, M.Pd
12. Kep.Perekonomian dan SDA : Drs. Fathur Rahman, M.Si
13. Kepala Organisasi Setda : Drs. Bachtiar Effendy, M.Si
14. Kepala Humas, Protokol Setda : Sigit Priyono, AP, M.Si
15. Sekretaris Dinakertrans : Supriyanto, S.Sos, M.Si
16. Sekretaris Disporapar : H Syaifullah Farid Wadjdi, SH, MH
17. Sekretaris BKPSDM : Khairul Hidayat, M.Si
18. Sekretaris Dinas Perpus dan arsi : Amin Djakfar, SH. M.Si
19. Sekretaris DPMPTSP : Ach Hermanto Eko Wahyudi, S.Sos
20. Sekretaris SATPOL PPP : Kusairi, SE
21. Sekretaris Dinas Pendidikan : Drs. Prama Jaya, M.Si
22. Sekretaris Inspektorat : Listijanto Djoko Trisulo, S.Sos,  
M.Si

Struktur organisasi diatas merupakan struktur pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan, adapun dalam penelitian ini karena membahas kepada bagian keuangannya, maka akan diuraikan tentang struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan.



13. Kep. Sub Bid. Pengelolaan Kas : Nur Fatihah, S.E.
14. Kep. Sub Bid. Analisis Pmbukuan : Lilik Wijiasih, S.E.
15. Kep. Sub Bidang PengemPajak : Achmad Faddlillah, S.Sos.
16. Kep. Sub Bid Penyusunan Anggaran : Siti Aisyah, S.E.
17. Kep. Sub Bid. Pelaporan Kas : Mohamad Arifin, S.E, M.M.
18. Kep. Sub Bid. Pelaporan Keuangan : Fitriyah, S.E.
19. Kep. Sub Bid. Pengelolaan Aset : Karif Ufi Wahyu, S.E.
20. Kep. Sub Bid. Pengelolaan Data Keu : Nina Lusiana, S.Sos.
21. Kep. Sub Bid Pembinaan Tata Usaha : Rokayyah, S.E.
22. Kep. Sub Bid Analisis Lap Keuangan: Tien Hadijati, S.E.
23. Kep. Sub Bid Rekonsialisasi : Rofiqoh Rahmaniya, S.T, M.SE.
24. Kepala Sub Bidang Penilaian Pajak : Agus Setiawan, S.E.
25. Kep. Sub Bid. Pengendalian Pengawas : Eko Purnomo, S.H.

## **B. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Pamekasan merupakan proses untuk menilai tingkat kemajaun kegiatan pemerintah kabupaten Pamekasan dibidang keuangan antara tahun 2016-2021. Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan daerah dengan menggunakan 4 rasio, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio keserasian belanja. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran pemerintah Kabupaten Pamekasan dari Badan Keuangan Daerah atau (BKD) Kabupaten Pamekasan, sehingga peneliti dapat memahami kinerja keuangan daerah. Hasil analisis rasio ini adalah:

## 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mendeskripsikan tingkat kapasitas daerah untuk kegiatan pemerintahannya sendiri, pembangunan dan melayani masyarakat setempat. Persentase yang lebih tinggi dari tingkat kemandirian keuangan berarti kurang bergantung pada bantuan eksternal dan sebaliknya. Rasio yang berdiri sendiri ini ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan transfer. Pendapatan transfer meliputi dana perimbangan, dana insentif daerah dan dana swadaya khusus, dana keistimewaan, dana desa, dana bagi hasil dan bantuan keuangan.

Rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah Lain - lain}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{150.538.624.797,00}{1.412.950.852.450,00} \times 100\% = 0,11$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{220.745.963.384,00}{1.357.551.055.000,00} \times 100\% = 0,15$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{179.974.568.986,00}{1.241.155.382.500,00} \times 100\% = 0,14$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{177.941.072.561,00}{1.355.370.107.000,00} \times 100\% = 0,13$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{182.735.353.662,00}{1.216.610.793.470,00} \times 100\% = 0,14$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{206.868.469.937,00}{1.278.534.508.133} \times 100\% = 0,16$$

**Tabel 4.1**  
**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2016-2021**

Tahun	Rasio
2016	0,11
2017	0,15
2018	0,14
2019	0,13
2020	0,14
2021	0,16



**Gambar 4.3 Rasio Kemandirian Daerah**

**Tabel 4.2**  
**Skala Interval Pola Hubungan Serta Tingkat Kemandirian**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0% - 25%	Intruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Keuangan Negara (2020)<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Fitriandi dkk., *Keuangan Negara*, 28.

Berdasarkan grafik gambar 4.3 dan tabel 4.1 terlihat rasio kemandirian daerah cukup signifikan dari tahun 2016-2021. Angka rasio tersebut cukup rendah dibawah 10%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Pamekasan memiliki tingkat kemandirian daerah yang sangat kecil, dimana Pendapatan Asli Daerah masih sangat rendah jika dibandingkan dengan pendapatan transfer Pusat atau Provinsi.

Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 6 tahun, pada tahun 2016 Rasio Kemandirian sebesar 0,11, ini termasuk dalam kategori Instruktif, artinya Pemerintah Pusat lebih dominan dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan daripada Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2017 Rasio Kemandirian menurun menjadi 0,15 meskipun presentasinya naik akan tetapi ini juga termasuk dalam kategori Instruktif. Pada tahun 2018-2021 Rasio Kemandiriannya dapat diartikan Pemerintah Kabupaten Pamekasan masih dalam kategori Instruktif. Penurunan presentase Rasio Kemandirian pada tahun 2019 ini disebabkan karena Pemerintah Pusat meningkatkan pemberian dana terhadap Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Sedangkan peningkatan presentase Rasio Kemandirian pada tahun 2020 ini disebabkan karena Pemerintah Pusat mengurangi pemberian dana kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Retno Suciati selaku kepala Bidang Akuntansi Pelaporan

“Iya, memang benar begitu adanya. Bahwasanya Pemerintah Daerah Pamekasan tingkat kemandiriannya masih dikatakan instruktif.”<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Retno Suciati, Kepala Bidang Akuntansi Pelaporan, *Wawancara Langsung* (27 Oktober 2022).

Dari hasil penelitian dan wawancara kepada Ibu Retno Suciati, S.E selaku kepala Bidang Akuntansi Pelaporan disimpulkan bahwa Kabupaten pamekasan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 ini masih dalam kategori Instruktif. Dimana Kabupaten Pamekasan masih belum mampu menggunakan dana pendapatan asli daerah untuk mendanai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat setempat. Artinya kabupaten Pamekasan masih mengandalkan dana pemerintah pusat untuk kegiatan daerah.

## 2. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan targetnya. Persentase efektivitas yang lebih tinggi berarti pemerintah lebih efektif dalam memobilisasi PAD. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{178.478.890.963,84}{150.538.624.797} \times 100\% = 1,19$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{243.311.843.020,28}{220.745.963.384} \times 100\% = 1,10$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{222.410.664.049,09}{179.974.568.986,00} \times 100\% = 1,24$$

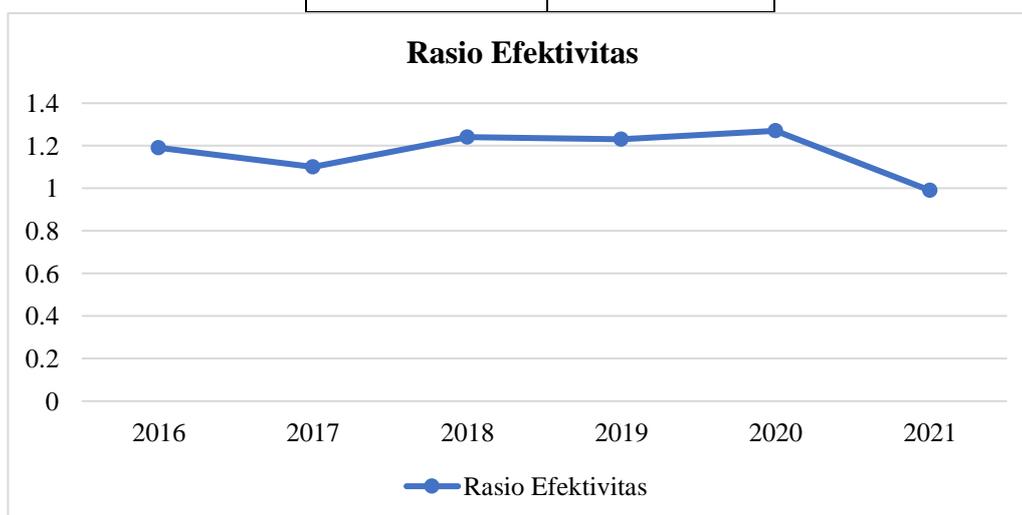
$$\text{Tahun 2019} = \frac{219.671.437.717,13}{177.941.072.561} \times 100\% = 1,23$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{232.262.477.004,71}{182.735.353.662} \times 100\% = 1,27$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{205.969.039.947,27}{206.868.469.937} \times 100\% = 0,99$$

**Tabel 4.3**  
**Rasio Efektivitas Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2021**

Tahun	Rasio
2016	1,19
2017	1,10
2018	1,24
2019	1,23
2020	1,27
2021	0,99



**Gambar 4.4 Rasio Efektivitas**

**Tabel 4.4**  
**Skala Interval Rasio Efektivitas**

Rasio Efektivitas	
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang Dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Keuangan Negara (2020)<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Fitriandi dkk., *Keuangan Negara*.

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat rasio efektivitas PAD dari tahun 2016-2021. Angka rasio tersebut tergolong sangat tinggi, karena diatas 100% yang menunjukkan efektivitas PAD sangat efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan dapat memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan target yang ditetapkan, karena realisasi PAD tiap tahun melebihi anggarannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Retno Suciati selaku kepala Bidang Akuntansi Pelaporan

“Iya benar, Pemerintah Daerah Pamekasan sudah dapat dikatakan sangat efektif dalam realisasi PADnya”<sup>15</sup>

Dari hasil penelitian dan wawancara kepada Ibu Retno Suciati, S.E selaku kepala Bidang Akuntansi Pelaporan disimpulkan dapat disimpulkan bahwa Rasio Efektivitas Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 6 tahun termasuk dalam kategori Sangat Efektif, ini dikarenakan Realisasi PAD lebih besar dari pada Anggaran PAD, sehingga Kabupaten Pamekasan dapat mencapai apa yang sudah ditargetkan.

### **3. Rasio Efisiensi**

Rasio Efisiensi menunjukkan bagaimana pemerintah daerah membelanjakan untuk memperoleh pendapatan dibandingkan dengan pendapatan yang direalisasikan. Semakin tinggi persentase rasio efisiensi keuangan daerah maka kinerja keuangan daerah semakin buruk.

---

<sup>15</sup> Retno Suciati, Kepala Bidang Akuntansi Pelaporan, *Wawancara Langsung* (27 Oktober 2022).

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{1.645.062.856.682,95}{1.827.846.755.474,84} \times 100\% = 0,90$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{1.463.511.253.199,73}{1.906.203.284.544,28} \times 100\% = 0,76$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1.458.086.461.650,32}{1.841.101.038.915,09} \times 100\% = 0,79$$

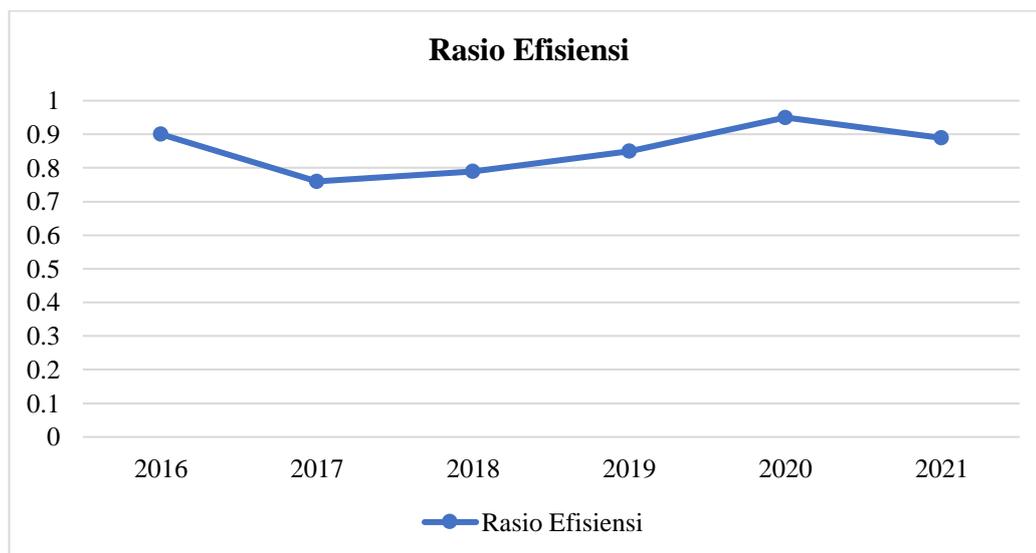
$$\text{Tahun 2019} = \frac{1.634.657.350.342,85}{1.920.014.132.343,13} \times 100\% = 0,85$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{1.745.260.812.350,12}{1.824.168.097.860,17} \times 100\% = 0,95$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{1.677.957.238.099,13}{1.879.358.460.454,42} \times 100\% = 0,89$$

**Tabel 4.5**  
**Rasio Efisiensi Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Rasio</b>
2016	0,90
2017	0,76
2018	0,79
2019	0,85
2020	0,95
2021	0,89



**Gambar 4.4 Rasio Efisiensi**

**Tabel 4.6  
Skala Interval Rasio Efisiensi**

Rasio Efisiensi	
Lebih dari 100%	Tidak Efisien
Sama dengan 100%	Efisien
Kurang dari 100%	Sangat Efisien

Sumber : Keuangan Negara (2020)<sup>16</sup>

Dapat dilihat dari tabel 4.5, dimana Rasio Efisiensi Kabupaten Pamekasan dalam kurun waktu 6 tahun, pada tahun 2016 Rasio Efisiensi Kabupaten Pamekasan sebesar 90 %, dimana pada tahun 2016 ini termasuk dalam kategori sangat efisien, karena Realisasi pendapatan lebih besar dari pada realisasi belanja. Pada tahun 2017 Rasio Efisiensi sebesar 76%, pada tahun 2018 sebesar 79%, pada tahun 2019 makin meningkat sebesar 85% dan tahun 2020 meningkat melebihi tahun 2016 ialah sebesar 0,95%, namun meski mengalami peningkatan pada tahun 2020 ini tetap

<sup>16</sup> Fitriandi dkk., *Keuangan Negara*.

termasuk dalam kategori sangat efisien, serta pada tahun 2021 Rasio Efisiensi sebesar 89 % meski peningkatannya cukup besar namun tetap dalam kategori sangat efisien karena masih dibawah 100 %.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Retno Suciati selaku kepala Bidang Akuntansi Pelaporan

“Iya benar, Pemerintah Daerah Pamekasan sudah dapat dikategorikan sangat efisien”<sup>17</sup>

Dari hasil penelitian dan wawancara kepada Ibu Retno Suciati, S.E selaku kepala Bidang Akuntansi Pelaporan dapat disimpulkan dalam kurun waktu 6 tahun Rasio Efisiensi di Kabupaten Pamekasan ini mengalami progresif tiap tahunnya, akan tetapi meskipun mengalami kenaikan Rasio Efisiensi di Kabupaten Pamekasan ini termasuk dalam kategori Sangat Efisien, ini disebabkan karena Realisasi Pendapatan lebih besar dari pada Realisasi Belanja.

#### **4. Rasio Keserasian Belanja**

Rasio keserasian belanja ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah mengoptimalkan atau memprioritaskan pendanaannya baik belanja operasional maupun belanja modal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja sehari-hari berarti semakin kecil pula persentase belanja investasi (Belanja Pembangunan) untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. Rasio Keserasian belanja dibagi menjadi 2 yaitu belanja operasional dan belanja modal.

---

<sup>17</sup> Retno Suciati, Kepala Bidang Akuntansi Pelaporan, *Wawancara Langsung* (27 Oktober 2022).

### a. Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{1.100.625.495.103,95}{1.846.638.211.688,95} \times 100\% = 0,59$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{1.088.706.942.368,00}{1.719.504.104.745} \times 100\% = 0,63$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1.137.378.297.494,49}{1.719.319.711.299,32} \times 100\% = 0,66$$

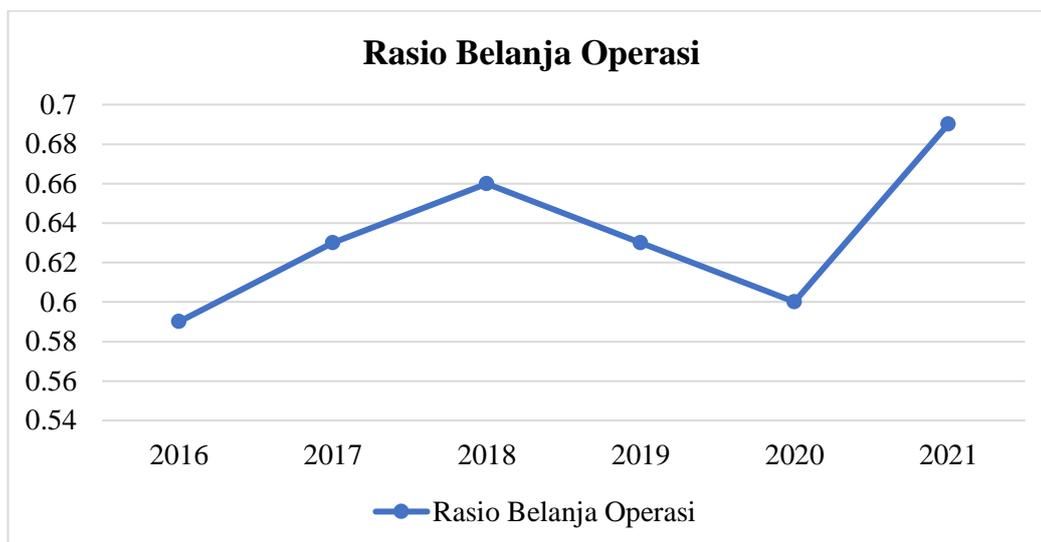
$$\text{Tahun 2019} = \frac{1.230.921.916.216,85}{1.949.149.808.057,85} \times 100\% = 0,63$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{1.239.889.477.519,74}{2.059.118.220.818,57} \times 100\% = 0,60$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{1.342.670.602.291,39}{1.978.703.844.095,13} \times 100\% = 0,67$$

**Tabel 4.7**  
**Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Kabupaten Pamekasan**  
**Tahun 2016-2021**

Tahun	Rasio
2016	0,59
2017	0,63
2018	0,66
2019	0,63
2020	0,60
2021	0,67



**Gambar 4.6 Rasio Belanja Operasi**

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan rasio belanja operasi memiliki proporsi paling besar dari total belanja daerah dari tahun 2016-2021 memiliki rasio di atas 50% dimana tahun 2021 sebesar 67% (0,67). Sedangkan dari grafik gambar 4.6 rasio belanja operasi mempunyai kecenderungan naik dari tahun 2016-2018 kemudian mengalami penurunan dari tahun 2019-2020. Walaupun terjadi penurunan belanja operasi di tahun 2020 tetapi rasio belanja operasi masih di atas 50%. Hal tersebut mengindikasikan pemerintah Kabupaten Pamekasan memiliki proporsi belanja operasi paling besar yang pada umumnya mempunyai tingkat pendapatan yang tinggi.

#### **b. Rasio Belanja Modal**

$$\text{Rasio Belanja Modal Thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{544.165.819.579,00}{1.846.638.211.688,95} \times 100\% = 0,29$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{372.031.422.731,73}{1.719.504.104.745} \times 100\% = 0,22$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{317.340.696.505,83}{1.719.319.711.299,32} \times 100\% = 0,18$$

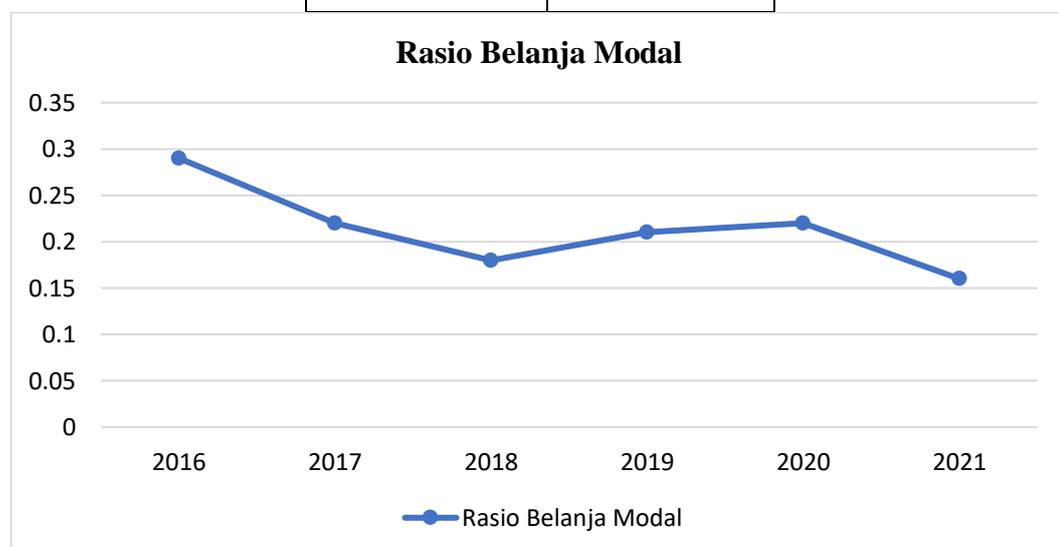
$$\text{Tahun 2019} = \frac{399.606.369.876,00}{1.949.149.808.057,85} \times 100\% = 0,21$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{462.851.108.600,38}{2.059.118.220.818,57} \times 100\% = 0,22$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{319.197.803.841,74}{1.978.703.844.095,13} \times 100\% = 0,16$$

**Tabel 4.8**  
**Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Kabupaten Pamekasan**  
**Tahun 2016-2021**

Tahun	Rasio
2016	0,29
2017	0,22
2018	0,18
2019	0,21
2020	0,22
2021	0,16



**Gambar 4.7 Rasio Belanja Modal**

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan rasio belanja modal terhadap total belanja di tahun 2018 memiliki rasio yang wajar yaitu sebesar 18% (0,18). Namun ditahun 2016, 2017, 2019, dan 2020 sudah di atas 20%, dimana tahun 2020 sebesar 22% masih mendekati normal. Sedangkan dari grafik 4.7 rasio belanja modal terhadap total belanja mempunyai kecenderungan yang menurun dari tahun 2016-2020. Hal tersebut mengindikasikan pemerintah Kabupaten Pamekasan telah memiliki aset modal yang cukup sehingga belanja modalnya tiap tahun menurun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Retno Suciati selaku kepala Bidang Akuntansi Pelaporan

“Iya benar, memang benar begitu adanya”<sup>18</sup>

Dari hasil penelitian dan wawancara kepada Ibu Retno Suciati, S.E selaku kepala Bidang Akuntansi Pelaporan maka dapat disimpulkan bahwa rasio belanja modal dan rasio belanja operasi masih belum dapat dikatakan serasi dimana pemerintah daerah Pamekasan masih memprioritaskan dana yang dimiliki untuk belanja kebutuhan belanja operasi seperti gaji pegawai sehingga rasio belanja modal relatif kecil.

---

<sup>18</sup> Retno Suciati, Kepala Bidang Akuntansi Pelaporan, *Wawancara Langsung* (27 Oktober 2022).

## **C. Pembahasan**

### **1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dengan Analisis Rasio Keuangan**

Adapun dalam penelitian ini, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan diukur dengan menggunakan 4 rasio, diantaranya:

#### **a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian daerah menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah sudah cukup mandiri keuangannya dan dalam pengelolannya, tidak bergantung kepada Pemerintah Pusat.

Akan tetapi, dalam penelitian ini, mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Pamekasan memiliki tingkat kemandirian daerah yang sangat kecil karena tingkat persentase dibawah 25% atau disebut pola hubungan instruktif, dimana Pendapatan Asli Daerah masih sangat rendah jika dibandingkan dengan pendapatan transfer Pusat atau Provinsi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Retno Suciati selaku kepala Bidang Akuntansi Pelaporan

“Iya, memang benar begitu adanya. Bahwasanya Pemerintah Daerah Pamekasan tingkat kemandiriannya masih dikatakan instruktif.”<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Retno Suciati, Kepala Bidang Akuntansi Pelaporan, *Wawancara Langsung* (27 Oktober 2022).

Dilihat dari rasio kemandirian daerah, kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2016-2021 dapat dikatakan belum optimal. Pemerintah daerah Pamekasan masih ketergantungan terhadap dana eksternal, belum mampu secara mandiri membiayai kegiatan pemerintah dalam hal pelayanan kepada masyarakat, kemudian ini juga berarti bahwa peran aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan di daerah masih sangat rendah, yang dalam hal ini berupa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan Farida Khairani yang mengindikasikan Kinerja Keuangan DPPKAD Kota Medan jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif, karena masih tergolong dalam interval 0%-25%. Yang penyebabnya hampir sama dengan penelitian ini yaitu masih mengandalkan pemerintah pusat daripada potensial daerahnya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah dibandingkan Pendapatan Lain Daerah ini dapat disebabkan karena kurangnya pengelolaan potensial daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak ataupun retribusi. Sehingga perlu adanya upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Upaya peningkatan pertumbuhan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada. Peningkatan kemandirian tidak akan mungkin terjadi apabila tidak terjadi peningkatan peran serta masyarakat yang tercermin dalam pembayaran pajak ataupun retribusi.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Fajri Ananda Fajri Ananda, *Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika dan Strategi Pembangunan* (Universitas Brawijaya Press, 2018), 28.

Peningkatan PAD dalam era otonomi berpengaruh pada tingkat kemandirian, karena dengan meningkatnya PAD akan meningkatkan rasio kemandirian. rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri pengeluaran dalam menjalankan pemerintahannya.<sup>21</sup>

#### **b. Rasio Efektivitas**

Rasio Efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan targetnya. Persentase efektivitas yang lebih tinggi berarti pemerintah lebih efektif dalam memobilisasi PAD. Efektivitas pada dasarnya berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan.

Dalam penelitian ini, dilihat dari rasio efektivitas, kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Pamekasan selaa tahun 2016-2021 dapat dikatakan baik. Hal ini mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan sudah mampu merealisasikan penerimaan PAD. Pemerintah Kabupaten Pamekasan dapat memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, karena realisasi PAD tiap tahun melebihi anggarannya. Dimana rata-rata persentase sudah di atas 90%. Dalam kurun waktu 2016-2020 dapat dikatakan sangat efektif dan pad atahun 2021 dapat dikatakan sudah efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Retno Suciati selaku kepala Bidang Akuntansi Pelaporan

---

<sup>21</sup> Fajri Ananda Fajri Ananda, *Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika dan Strategi Pembangunan* (Universitas Brawijaya Press, 2018), 28.

“Iya benar, Pemerintah Daerah Pamekasan sudah dapat dikatakan sangat efektif dalam realisasi PADnya”<sup>22</sup>

Hal ini sama dengan penelitian Runik Puji Rahayu yang ditemukan bahwa LRA berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dengan kesimpulan bahwa Kinerja Dinas PU Bina Marga Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat Pada tahun 2012-2013 mengalami Penurunan kinerja yaitu sebesar (61,02%), sedangkan tahun 2013-2014 Mengalami Kenaikan Kinerja yaitu 116,54% Meskipun demikian Pendapatan Asli Daerah sudah dikatakan efektif.<sup>23</sup>

### c. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi menunjukkan bagaimana pemerintah daerah membelanjakan untuk memperoleh pendapatan dibandingkan dengan pendapatan yang direalisasikan. Rasio efisiensi daerah merupakan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin tinggi persentase rasio efisiensi keuangan daerah maka kinerja keuangan daerah semakin buruk.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan selama tahun 2016-2021 dilihat dari rasio efisiensi, dapat dikatakan sudah efisien hal ini karena tingkat efisiensi berada diposisi sangat efisien atau persentase berada dibawah 100%. Artinya pemerintah daerah Pamekasan membelanjakan anggaran belanja untuk memperoleh pendapatan sudah

---

<sup>22</sup> Retno Suciati, Kepala Bidang Akuntansi Pelaporan, *Wawancara Langsung* (27 Oktober 2022).

<sup>23</sup> Universitas Madura Dan Runik Puji Rahayu, “Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan,” *Makro: Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 31 Mei 2016, <https://doi.org/10.36467/Makro.2016.01.01.05>.

efisien. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Retno Suciati selaku kepala Bidang Akuntansi Pelaporan

“Iya benar, Pemerintah Daerah Pamekasan sudah dapat dikategorikan sangat efisien”<sup>24</sup>

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang sama yang dilakukan oleh Ruliaty, Ismail Badollahi dan A Indah Nurfadillah pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa analisa laporan realisasi anggaran dikatakan efisien sebesar 2,13% , 2,71% , 2,16% hal ini hampir sama dengan yang ada dalam penelitian ini yang mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Pamekasan sudah efisien.<sup>25</sup>

#### **d. Rasio Keserasian Belanja**

Rasio keserasian belanja ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah mengoptimalkan atau memprioritaskan pendanaannya baik belanja operasional maupun belanja modal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja sehari-hari berarti semakin kecil pula persentase belanja investasi (Belanja Pembangunan) untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat.

Akan tetapi dalam penelitian ini dengan analisis keserasian belanja belum dapat dikatakan baik. Sebagai dana pemerintah Kabupaten Pamekasan diprioritaskan untuk belanja operasional atau kebutuhan belanja tidak langsung, sehingga belanja modal kurang terkoordinasi dibandingkan belanja operasional. Pemerintah Kabupaten Pamekasan memprioritaskan pengeluaran sehari-hari untuk

---

<sup>24</sup> Retno Suciati, Kepala Bidang Akuntansi Pelaporan, *Wawancara Langsung* (27 Oktober 2022).

<sup>25</sup> Ismail Badollahi Dan A Indah Nurfadillah, “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone” 1, No. 1 (2019): 27.

memenuhi kegiatan pemerintah Kabupaten Pamekasan dan masih belum mengutamakan pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Retno Suciati selaku kepala Bidang Akuntansi Pelaporan

“Iya benar, memang benar begitu adanya”<sup>26</sup>

Dan didukung oleh penelitian yang dilakukan Rigel Nur Fatah tahun 2017 yang menunjukkan Rasio Belanja Modal di kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan terjadi pada tahun 2013 dan 2014. Sedangkan tahun-tahun lainnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 rasio belanja modal sebesar 5,48% naik menjadi 10,50% di tahun 2011. Kemudian di tahun 2012 naik menjadi 13,79%. pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 11,55% dan di tahun 2014 menjadi 8,30%.<sup>27</sup>

Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Rasio Belanja Operasi masih sangat besar dibandingkan Rasio Belanja Modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan oleh belanja pegawai yang relatif besar, Pemerintah kabupaten Pamekasan lebih banyak mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi

---

<sup>26</sup> Retno Suciati, Kepala Bidang Akuntansi Pelaporan, *Wawancara Langsung* (27 Oktober 2022).

<sup>27</sup> Fathah, “Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul.”

yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintahan Kabupaten Pamekasan kecil atau belum terpenuhi.

Untuk itu, ke depannya Pemerintah Kabupaten Pamekasan diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Peningkatan pemerintah daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Selain itu, bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah.<sup>28</sup>

## **2. Pelaksanaan Efisiensi dan Efektivitas Terhadap Pengelolaan Sumber Daya**

Rata-rata pelaksanaan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Sumber Daya Kabupaten Pamekasan dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari total pendapatan daerah yang lebih besar dari total belanja daerah. Meski volume perolehannya kecil namun bisa dikatakan efisien. Dapat dikatakan bahwa dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pamekasan telah mampu menekan pengeluaran di

---

<sup>28</sup> Fajri Ananda Fajri Ananda, *Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika dan Strategi Pembangunan* (Universitas Brawijaya Press, 2018), 28.

Kabupatennya. Dan dengan memanfaatkan sumber daya alam di Pamekasan, pendapatan Kabupaten Pamekasan dapat ditingkatkan. Selain itu, dapat dikatakan cukup efektif, karena pendapatan dinas pajak dan retribusi daerah melebihi anggaran sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga dapat dikatakan telah bekerja dengan baik dalam mewujudkan PAD yang direncanakan.

Namun, untuk mempertahankannya, pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan pendapatannya dari potensi pendapatan yang ada. Dalam rangka meningkatkan PAD, inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan. Pemerintah garis keturunan harus mencari alternatif yang mungkin untuk mengatasi kekurangan dana, yang membutuhkan kreativitas eksekutif keuangan daerah untuk menemukan sumber pendanaan baru melalui program kolaboratif. Pembiayaan dengan swasta dan rencana peningkatan PAD, seperti pembentukan BUMD sektoral yang potensial.

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian memaparkan sesuai dengan yang diperoleh di lapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Beberapa hasil temuan yang bisa dilaporkan dalam bentuk tulisan terdapat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.9**  
**Temuan Penelitian**

<b>No</b>	<b>Rasio Kinerja Keuangan</b>	<b>Temuan Penelitian</b>
1	Rasio Kemandirian Daerah	Pemerintah Kabupaten Pamekasan memiliki tingkat kemandirian daerah yang sangat kecil, dimana Pendapatan Asli Daerah masih sangat rendah jika dibandingkan dengan pendapatan transfer Pusat atau Provinsi. Hal ini

		karena pemerintah daerah masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat daripada potensial daerahnya sendiri
2	Rasio Efektivitas	Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan sudah baik karena masuk kategori sangat efektif dalam memobilisasi penerimaan PAD. Karena Pemerintah Kabupaten Pamekasan dapat memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan target yang ditetapkan, dimana realisasi PAD tiap tahun melebihi anggarannya
3	Rasio Efisiensi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan sudah dapat dikatakan sangat efisien, hal ini karena pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan membelanjakan anggaran belanja untuk memperoleh pendapatan sudah cukup baik.
4	Rasio Keserasian Belanja	Rasio keserasian belanja pemerintah daerah pamekasan asih dikategorikan tidak stabil karena Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan oleh belanja pegawai yang relatif besar, Pemerintah kabupaten Pamekasan lebih banyak mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran rutin untuk

		pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum terlalu memperhatikan pembangunan daerah.
--	--	--